



BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 memuat capaian kinerja yang terdiri dari profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 yang memuat data dan informasi yang akan digunakan oleh kepala daerah sebagai bahan untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan sebagai alat deteksi dini permasalahan dalam melaksanakan kebijakan. keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pangkalpinang, 30 Maret 2021
GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZALDI ROSMAN



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,3	71,47	0,24
2	Angka Kemiskinan	4,5	4,89	8,86
3	Angka Pengangguran	3,58	5,25	46,64
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,32	-2,3	-169,27
5	Pendapatan Per kapita	50.911.426	49.772.286	-2,24
6	Ketimpangan Pendapatan	0,262	0,257	-1,91

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan				
		Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	73	Dapodik per tanggal 13-01-2021	
		Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.100	Keputusan Kepala Dinas Pendidikn Prov. Kep, Babel	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.100	Keputusan Kepala Dinas Pendidikn Prov. Kep, Babel	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24.750	Dapodik per tanggal 13-01-2021	Sekolah negeri
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.392	Dapodik per tanggal 13-01-2021	Sekolah negeri
		Jumlah kebutuhan Minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Min. 1.963	AnalisisKebutuhan Guru SMA; Dapodik, Oktober 2020	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	2.131	dapodik	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah Menengah Atas (Negeri dan Swasta)	1.821	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	1.757	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga Kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Min. 497 tenaga kependidikan	AnalisisKebutuhanTendikberdasarkan SNP	Kepala TU (1 orang), Tenaga administrasi (3 orang), KepalaPerpustakaan (1 orang), Tenaga Perpustakaan (1 orang), Laboran (1 orang), Min. 7 x 71 sekolah = 497
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	683	Analisis GTK	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	753	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	682	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang	680	Dapodik per tanggal 12-01-2021	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	669	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	8	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	33	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	8	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang	25	Dapodik per tanggal 12-01-2021	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	334	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	318	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	64%		
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	25		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	0		
		Jumlah SDM di pos kesehatan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	0		
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			
		Jumlah kegiatan Edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	0		
		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang Kemungkinan KLB Lintas kabupaten/kota	11		
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	33.461,41 ha		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	140,709,45 m2		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	196,76 ha		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	12,590 m		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	0		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Tanggul : 21.499 m Talud : 6,735 m		
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)			
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)			
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	196,76 ha		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS	12,590 m'		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kewenangan provinsi (m)			
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	0		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Revetment, Bulekhead		
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	11,42%		
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	3,06%		
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0		Kewenangan DISTAN
		Pemenuhan dokumen RISPAM Lintas kabupaten/kota	0		
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	0		
		Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0		
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		SPAM			
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0		
		Jumlah SPALD Regional	0		
		Total kapasitas SPALD Regional	0		
		Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0		
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0		
		Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0		
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	850,99 km		
		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Tidak ada		
		Panjang jalan yang dibangun	0		
		Panjang jembatan yg dibangun	0		
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	34,45 km		
		Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan	0		
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	21,1		
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang jalan yang dipelihara	711,58		
		Panjang jembatan yang dipelihara	3.508,75 m		
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	2		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1.916 orang		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1.221 orang		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada		
		Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada		
		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja(LPKK)			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat,	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0		Tidak ada bencana tahun 2020
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	112,44 ha		
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	20 unit		
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	0		
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
		Jumlah pengembang yang teregistras	0		
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	22.635 orang		
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.060 orang		
		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	149 unit		
		Jumlah Perda Perkada yang ditegakkan dan	3 perda/perkada		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10 orang		
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	21 SOP		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Ada		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Ada		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana	Tidak Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kontijensi provinsi			
		Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	1 kegiatan		
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Tidak ada		
		Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Tidak ada		
		Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada Tim Reaksi Cepat Provinsi		
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1 kegiatan		
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	11 jenis		
6	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	18 orang		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	18 orang		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	2 asrama		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 pak obat-obatan ringan		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1 orang ASN, 4 orang PHL		
		Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	1 unit alat tensi meter, 1 unit timbangan		
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 orang ASN, 4 orang PHL		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	12 paket bimbingan		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (3 Bimbingan)		
		Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Kependudukan di dalam panti	1 orang a.n Saiman		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	18 orang		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0		
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	27 orang		
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	27 orang		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	1 unit		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	1 paket obat-obatan ringan		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	5 orang		
		Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 unit timbangan badan, 1 pak obat, 1 unit tensi digital, 1 unit alat ukur tinggi badan		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos)	5 orang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		medis) yang disediakan di dalam panti			
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2 orang		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	4 paket bimbingan		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (3 paket bimbingan)		
		Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	0		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	27 orang		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	27 orang		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	27 orang		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket	6 orang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi			
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	6 orang		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1 unit		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	2 unit		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 paket obat-obatan		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	5 orang		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	5 orang		
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2 orang		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (3 paket bimbingan)		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam panti			
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	6 orang		
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	6 orang		
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	0		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	2 orang		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti			
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga			
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	0		
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	635 orang		
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	392 orang		
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	93 orang		
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	427 orang		
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	24 orang		
		Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	444 orang		
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Ada		
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Tidak ada		
		Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga	Tidak ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kerja			
		Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Tidak ada		
		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	100%		
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%		
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0,02%		
		Persentase penganggur yang dilatih	0		
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	13,75%		
		Persentase penyerapan lulusan	0		
		Persentase LPK yang terakreditasi	0		
		Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) diberikan pelatihan	0		
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia(CPMI/CTKI)	0		
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0		
		Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		jejaring peningkatan produktivitas			
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	34%		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	134%		
		Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	12.949 orang		
		Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	0		
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	92%		
		Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	0		
		Persentase jumlah perusahaan Yang berselisih	6,8%		
		Jumlah mogok kerja	3 perusahaan		
		Jumlah penutupan perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan kepentingan	1 kasus		
		Jumlah perselisihan hak	65 kasus		
		Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	35 kasus		
		Jumlah perselisihan PHK	72 kasus		
		Jumlah pekerja/buruh yang	836 orang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ter-PHK			
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	62 kasus		
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada		
		Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 3.230.023,66		
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	82,08%		
		Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	Tidak ada		
		Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	Tidak ada		
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	1		
		Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam	100.006 lowongan		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		satu wilayah provinsi			
		Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	33 orang		
		Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	5 orang		
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada		
		Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada		
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK)	0,008%		
		online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)			
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	0		
		Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) yang diterbitkan	0		
		Jumlah pos	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)			
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	263 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	221 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	175 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	194 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	226 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	87 perusahaan		
		Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	1 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	1.598 perusahaan		
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih	32 Perangkat Daerah		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PUG			
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	23 Perangkat Daerah		
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 (Bangka Pos)		
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 lembaga		
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%		Data dukung belum TTD
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 (PATBM)		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1 lembaga (KPAD)		
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0		
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak	1 (UPTD)		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perempuan yang telah terstandarisasi			
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Satgas PPA		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas Pemerintah Provinsi (APBD provinsi) oleh Daerah	0		
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada		
		Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada		
		Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	14,77%		
		Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak ada		
		Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	5 kali		
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada		
		Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada		
		Tertanganinya	Tidak ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kejadian kerawanan pangan			
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada		
		Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada		
10	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	0		
		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0		
		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0		
		Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0		
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	0		
		Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	100%		
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin	2,94%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi			
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	0		
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	77,27%		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100%		
		Fasilitasi pelayanan Adminduk	100%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0		Desa tertinggal
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0		Desa tertinggal
		Jumlah lembaga kemasyarakatan	0		Desa tertinggal

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		Desa tertinggal
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0		
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	11-8		
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100%		
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	93,52%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perdakan			
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,1		
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28,2		
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	77,7%		
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	35		
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	9,76%		
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,43%		
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	(pokja advokasi sudah terbentuk di 7 kab/kota namun belum efektif)		
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	77,97%		
		Persentase kesertaan KB di	7,14%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah			
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	42,73%		
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	0		
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	100%		
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	36,41%		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,8%		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	96,8%		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra	Ya		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	59,37%		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50%		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0		
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%		
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	12,5%		
		Persentase	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perangkat daerah yang mengimplementai inovasi yang mendukung smart city			
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%		
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada		
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	67,45%		
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	21,8%		
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	62,5%		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	9,3%		
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	70%		
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan	40%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,4%		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	2,6%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	8%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	4%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,66%		
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	5,60%		
		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0		
		Persentase jumlah	0,55%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		usaha kecil yang diberikan dukungan Fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha			
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan Fasilitas pemasaran	1,38%		
		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	2,5%		
		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	1,44%		
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi tanggal 28 Juli 2017		
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0		
		Kegiatan pameran penanaman modal	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0		
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	14 pengaduan		
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	837		
		Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 2.561.150.700.000,-		
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	75 aparatur		
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	68 perusahaan PMA dan PMDN		
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	668 data		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	35		
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	136		
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		organisasi kepemudaan			
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Pelatih PPLP = 5 orang SKO = 14 orang		
		Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	PPLP = 19 Orang SKO = 71 Orang		
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2 event		
		Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	76		
		Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	0		
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada "Potensi dan Pesona Bumi Serumpun Sebalai Tahun 2020"		
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0		
		Jumlah survey Statistic sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0		
		Persentase	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral			
		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	0		
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0		
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	15,38		
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	3,30		
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	3,1		
22	Kebudayaan	Jumlah obyek	9		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemajuan kebudayaan yang dilindungi inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)			
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	9		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3		
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	86+174=260		
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	53-0=53		
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi,	1		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemeliharaan dan pemugaran			
		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak ada		
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1		
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1		
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	3.724 orang		
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Tidak ada		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	5		
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6		
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	7		
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	9		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	5		
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Tidak ada		
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	5		
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Tidak ada		
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,676%		
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,00134%		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,00191%		
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6,52%		
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	pengunjung perpustakaan = 5.926 orang, pusling = 2.036 orang, total pengunjung perpustakaan = 7.962 orang target pengunjung tahun 2020 = 12.500 orang		
		Jumlah KCKR	1.363 judul		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Daerah yang dihimpun	dan 2.119 eksemplar		
		Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	925		
		Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	13		
		Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	237		
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		
24	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%		
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	67,05%		
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%		
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2 dokumen		
		Perlindungan dan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK			
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	1		
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0		
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	5		
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber dayanya (wpp)	1 WPP		
		Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berukuran 5-30 GT			
		Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	0,43%		
		Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	0		
		Jumlah kapal yang terdaftar	0		
		Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	0		
		Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100		
		Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	82,23%		
		Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	14 kapal		
		Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan	- Pembudi daya yang diperiksa = 30		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	<p>pelaku usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki izin 15 pelaku usaha - tidak memiliki izin 15 pelaku usaha 		
		Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - UPI yang diperiksa 26 UPI - Memiliki izin 19 UPI - Tidak memiliki izin 7 UPI 		
		Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Belum ada yang diperiksa		
		Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	33		
		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	0		
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	2		
		Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Tidak ada		
		Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Tidak ada		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	Tidak ada		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,89 hari		
		Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,84 hari		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2.476 orang		
		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	221.475 orang		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tidak ada		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Tidak ada		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak ada		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Tidak ada		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor	Tidak ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kepariwisataan			
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Tidak ada		
27	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	46		
		Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Pangan 24, hortikultura 13		
		Dokumen pengawasan benih yang beredar	33		
		Prasarana pertanian yang digunakan	100%		
		Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	58 kegiatan		
		Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	1 ha		
		Penerbitan izin usaha pertanian	Pangan 5, hortikultura 9		
		Persentase sarana pertanian yang digunakan	100%		
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%		
		Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Pangan 83%, hortikultura 100%		
28	Kehutanan	Dokumen penataan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		hutan wilayah KPH			
		Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	20,33		
		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	4.206 ha		
		Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0,086%		
		Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	4,46%		
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m ³ per tahun yang aktif	100%		
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Ada		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	4 kelompok, 135 orang		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	138 ha		
		Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0		
		Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	80%		
		Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	31,25%		
		Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	83,33%		
		Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok	164		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perhutanan sosial			
		Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	1,38%		
		Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	5		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Perda No 5 Tahun 2016 tentang Konservasi Sumber Daya Air		
		Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Ada		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaa nair tanah Provinsi Kep. Babel dan Pergub Nomor 40 Tahun 2015 tentang tata cara peberbitan perizinan air tanah		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
		Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Pergub Nomor 17 Tahun 2019 tentang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nilai perolehan air tanah		
		Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kep. Babel tahun 2020-2040		
		Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral, perda nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah di Provinsi Kep. Babel dan Pergub Nomor 59 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			logam dan batuan, penyesuaian izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan afiliasi serta izin pertambangan rakyat		
		Perda/Pergub terkait IUJP	Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral,		
		Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Pergub Nomor 53 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan harga patokan bukan logam dan batuan di wilayah Provinsi Kep. Babel		
		Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0		Koordinasi dengan DPMPTSP
		Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak ada		
		SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Tidak ada		
		Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	ketenaga listrikan daerah		
		Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Pelaksanaan pembangunan	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu			
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	20%		
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh Fasilitas pengembangan produk	43%		
		Persentase pelaku usaha yang Memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	33,33%		
		Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	10%		
		Jumlah penanganan pengaduan konsumen	108		
		Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	102		
		Jumlah komoditi potensial yang dipantau	1		
		Indeks Kinerja BPSMB	4		
		Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0		
		Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0		
		Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0		
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%		
		Pengawasan pupuk dan pestisida Terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	0		
		Jumlah barang beredar yang diawasi	51 barang		
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	0		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9,74%		
		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	110%		
		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	37,74%		
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0		
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
		Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	54,7%		
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1 kawasan		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 kawasan		
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	0		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	81,68		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	58,25		
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,15%		
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100%		
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	4,03%		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	15,30%		
		Rasio luas daerah	10,28%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0		PERKIM
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0		PERKIM
		Rasio kemantapan jalan	91,54%		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	63,72%		
4	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0		
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	0		
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0		
5	Ketenteraman, Ketertiban	Persentase gangguan Trantibum	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum dan Perlindungan Masyarakat	yang dapat diselesaikan			
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%		
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	50%		
		Persentase penanganan pra bencana	42,86%		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	90%		
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	112,50%		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	35,83%		
7	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang	28,57%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		menyusun rencana tenaga kerja			
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			PDRB (nunggu data BPS)
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	125,21%		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,027%		
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan	16,65%		
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,00068%		
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	3,1%		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	16,5%		
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan	0,0012%		
10	Pertanahan	Persentase	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0		
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota			
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	0		Tidak ada data, karena hasil perhitungan dari pusat belum diterima oleh DLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	14,28%		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100%		
		Pemanfaatan data kependudukan	96,96%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0		
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5,61%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,31%		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive)	77,7%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Prevalence Rate/mCPR)			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,04%		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	46,3%		
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	35,5%		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,8%		
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	13%		
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	73,37%		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	14,67%		
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	0		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	39,68%		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,02%		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	0,08%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		organisasi sosial kemasyarakatan			
		Peningkatan Prestasi Olahraga	0		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	87,50		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	90,6		
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0		
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	1		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	66,76%		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0%		
25	Kelautan dan	Jumlah Total	219.034		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perikanan	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	68,96%		
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	73,25%		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	55,43%		
		Tingkat hunian akomodasi	22,19%		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0		Masih nunggu data BPS
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3,30 ton/ha		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	77%		
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	18,18%		
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	4,30%		
		Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	20,33%		
29	Energi dan Sumber Daya	Persentase Usaha Tambang Sesuai	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mineral	Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda			
		Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100		
30	Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	8,73%		
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	100%		
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	96,52%		
		Tertib Usaha	0		
		Persentase kinerja realisasi pupuk	99,98%		
		Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	7,8%		
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	9,74%		
31	Perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	6%		
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	37,74%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	25%		
32	Transmigrasi				Tidak ada IKK outcome

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	0,30		
		Rasio PAD	0		Nunggu data BPS
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	13,48		
		Opini Laporan Keuangan	WTP		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2+		
2	Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0		Surat pernyataan
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	2,21%		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	82,91%		
3	Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	512,03%		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,80%		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	0		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesehatan)			
4	Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,38		
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-28,84		
		Assets Management			
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9,73		
5	Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	100		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian

kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja;

Tabel 2.3.1
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No	Uraian	Indikator kinerja	Target Tahun 2020	Target akhir RPJMD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	3,15	5,15
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,45	4,00
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan domestik	217.345	477.181
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,04	0,24
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,63	0,73
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1,25	2,86
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,26	0,26
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	5,42	5,30

No	Uraian	Indikator kinerja	Target Tahun 2020	Target akhir RPJMD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,77	5,00
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4	6,02
10	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,08	2,08
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan	0,10	0,10
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,60	0,60
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,08	12,00
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	9,00
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,7	70,48
		Angka kematian ibu	21	33
		Angka Kematian Bayi	7,16	7,12

No	Uraian	Indikator kinerja	Target Tahun 2020	Target akhir RPJMD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Angka Stunting	24	7,20
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		Indeks RB	67,41	75
15	MeningkatnyaAspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,76	87,82
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,79	81,85
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,36	80,54
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,25	0,35
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	59,81	69,88

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3.2
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	3,15	7,78	246,98	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor	3,45	9,76	282,89	Sangat Berhasil

No	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		perikanan				
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan domestik	217.345	223.951	103,04	Berhasil
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,04	0,02	50,00	Kurang Berhasil
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,63	-9,23	-1.500	Kurang Berhasil
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1,25	-5,64	-451	Kurang Berhasil
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,26	0,27	103,85	Sangat Berhasil
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	5,42	5,25 (Agus 2020)	103,23	Sangat Berhasil
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,77	4,53 (Maret 2020)	128,22	Sangat Berhasil
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4	1,08	370,37	Sangat Berhasil
10	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,08	1,70	122,35	Sangat Berhasil
11	Meningkatnya konektivitas	Rasio Ketersediaan	0,10	0,10*	100,00	Berhasil

No	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	antar wilayah	Transportasi layak jalan				
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43*	100,00	Berhasil
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,60	0,84*	140,00	Sangat Berhasil
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,08	12,05	99,75	Berhasil
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	8,06	100,37	Sangat Berhasil
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,7	70,64	99,92	Berhasil
		Angka kematian ibu	21	26	80,76	Berhasil
		Angka Kematian Bayi	7,16	7,15	100,1	Sangat Berhasil
		Angka Stunting	24	9,7	247,42	Sangat Berhasil
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	Berhasil
		Indeks RB	67,41	66,84	99,15	Berhasil
15	Meningkatnya Aspek	Skor aspek kebebasan	87.76	84,12	95,85	Berhasil

No	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kebebasan sipil	sipil				
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,79	75.48	92,29	Berhasil
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,36	71.71	89,24	Berhasil
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,25	0,40	160	Sangat Berhasil
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	59,81	65,80	110,02	Sangat Berhasil

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 2.3.3
Pengukuran Capaian Kinerja
Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,22	7,78	Naik 3,56
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	8,11	9,76	Naik 1,65
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan	438.373	223.951	Turun 214.422

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		domestik			
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,13	0,02	Turun 0,11
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,87	-9,23	Turun 8,36
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1,17	-5,64	Turun 4,47
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,27	0,27	TETAP
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	3,62	5,25	Naik 1,63
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,50	4,50	TETAP
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,62	1,08	Naik 1,54
10	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	1,98	1,70	Naik 0,28
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan	0,10	0,10*	TETAP

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43*	TETAP
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,84	0,60*	TETAP
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,87	12,05	Naik 0,18
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,98	8,06	Naik 0,08
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,50	70,64	Naik 0,14
		Angka kematian ibu	137,34	26	Naik 111,34
		Angka Kematian Bayi	7.16	7,15	Naik 0,01
		Angka Stunting	7,70	9,7	Turun 2
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	TETAP
		Indeks RB	65,39	66,84	Naik 1,45
15	MeningkatnyaAspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	84,12	84,12	TETAP

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	75.48	75.48	TETAP
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	71.71	71.71	TETAP
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,24	0,40	Naik 0,16
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,80	65,80	TETAP

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD

Tabel 2.3.4
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020	Persentase Pencapaian	Status Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	5,15	7,78	151,06	MELEBIHI TARGET 2,63
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	4,00	9,76	244	MELEBIHI TARGET 5,76
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan domestik	477.181	223.951	46,93	MASIH TERSISA 214.422
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,24	0,02	8,3	MASIH TERSISA 0,22
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,73	-9,23	-1.264,3	MASIH TERSISA 9,96
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,86	-5,64	- 197,2	MASIH TERSISA 8,5

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020	Persentase Pencapaian	Status Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,26	0,27	103,8	MELEBIHI TARGET 0,01
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	5,30	5,25	100,9	MELEBIHI TARGET 0,05
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,00	4,50	111,1	MELEBIHI TARGET 0,5
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,02	1,08	557,4	MELEBIHI TARGET 4,94
10	Terkendalanya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,08	1,70	122,3	MELEBIHI TARGET 0,38
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan	0,10	0,10*	100	SUDAH TERCAPAI
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43*	100	SUDAH TERCAPAI
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,60	0,60*	100	SUDAH TERCAPAI
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki,	12,00	12,05	100,4	MELEBIHI TARGET 0,05

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020	Persentase Pencapaian	Status Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kat	Angka harapan lama sekolah perempuan)				
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,00	8,06	89,5	MASIH TERSISA 0,94
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,48	70,64	100,2	MELEBIHI TARGET 0,16
		Angka kematian ibu	33	26	126,9	MELEBIHI TARGET 7
		Angka Kematian Bayi	7,12	7,15	99,5	MASIH TERSISA 0,03
		Angka Stunting	7,20	9,7	74,2	MASIH TERSISA 2,5
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	SUDAH TERCAPAI
		Indeks RB	75	66,84	89,12	MASIH TERSISA 8,16
15	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,82	84,12*)	97,78	MASIH TERSISA 3,7
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,85	75,48*)	92,2	MASIH TERSISA 6,37
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,54	71,71*)	89,03	MASIH TERSISA 8,83

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020	Persentase Pencapaian	Status Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	si					
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,35	0,40	114,2	MASIH TERSISA 0,05
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	69,88	65,80 *)	94,16	MASIH TERSISA 4,08

Ket :

*) Data Tahun 2019

Data Tahun 2020 masih menunggu rilis dari BPS.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya Anggaran

Tabel 2.3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2020	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	3,15	7,78	246,98	24.638.667.049	23.108.619.870	93,79	6,21
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,45	9,76	282,89	12.069.013.551	11.330.150.350	93,88	6,12
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan domestik	217.345	223.951	103,04	236.991.039	236.989.039	100,00	0
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,04	0,02	50,00	169.934.855	160.609.225	94,51	0
4	Meningkatnya Produksi sektor	Persentase Pertumbuhan Produksi	0,63	-9,23	-1.500	978.601.330	840.350.871	85,87	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2020	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pertambahan	sektor pertumbuhan dan penggalan							
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1,25	-5,64	-451	7.021.362.415	6.200.786.695	88,31	0
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,26	0,27	103,8	7.609.149.091	6.597.832.086	86,71	13,29
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	5,42	5,25	103,23	13.690.635.129	12.206.784.330	89,16	10,84
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,77	4,50	128,22	6.083.561.448	5.390.172.000	88,60	11,4
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4	1,08	370,37	566.448.000	552.422.425	97,52	2,48
10	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,08	1,70	122,35	566.063.900	539.560.881	95,32	4,68
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan	0,10	0,10*	100,00	269.638.306.514	256.120.787.846	94,99	5,01
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43*	100,00	3.396.375.071	3.162.777.639	93,12	6,88
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,60	0,60*	100,00	7.719.104.078	7.650.733.559	99,11	0,89
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,08	12,05	99,75	27.949.566.700	26.981.245.840	96,54	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2020	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	8,06	100,37	252.923.456.201	158.146.374.720	62,53	37,47
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,7	70,64	99,92	4.829.206.995	2.979.058.411	61,69	0
		Angka kematian ibu	21	26	80,76	25.509.569.195	23.143.441.636	90,72	0
		Angka Kematian Bayi	7,16	7,15	100,1	29.147.452.750	24.982.795.426	85,71	14,29
		Angka Stunting	24	9,7	247,42	137.683.083.816	132.371.602.337	96,14	3,86
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	3.527.325.869	2.349.747.412	66,62	33,38
		Indeks RB	67,41	66,84	99,15	72.531.455.042	67.790.577.694	93,46	0
15	Meningkatnya Aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,76	84,12*)	95,85	65.326.780	63.012.880	96,46	0
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,79	75,48*)	92,29	899.937.412	854.312.860	94,93	0
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,36	71,71*)	89,24	3.293.354.421	2.909.094.233	88,33	0
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,25	0,40	160	23.016.451.360	20.745.967.410	90,14	0
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	59,81	65,80 *)	110,02	7.653.059.998	7.016.394.214	91,68	8,32
<p>TOTAL EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2020 ADALAH</p> <p>Rp. 116.195.417.744,-</p> <p><i>(Seratus Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratur Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)</i></p>									

Ket : *) Data Tahun 2019 Data Tahun 2020 masih menunggu rilis dari BPS.

Tingkat efisiensi anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja anggaran. Semakin inerja sasarnya tercapai dan penganggarannya masih bersisa dapat dikatakan telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan penghitungan,

maka akan diketahui efisien atau tidaknya penggunaan anggaran terhadap pencapaian target sasaran yang sudah ditetapkan.. Dalam memberikan penilaian tingkat efisiensi dapat menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Skala Pengukuran Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja

No	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Anggaran	Kategori
1	100 % s.d. diatas 100 %	< 100	Efisien
2	< 100 %	< 100	Tidak efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 27 indikator sasaran kinerja terdapat 11 indikator kinerja yang penggunaan anggarannya efisien dan 16 indikator kinerja yang penggunaan anggarannya tidak efisien.

Dari 11 indikator kinerja yang efisien dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 116.195.417.744,-** atau terbilang (*Seratus Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratur Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dengan Indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan dengan **capaian kinerja 133,97%** sedangkan realisasi anggaran 93,79 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 6,21 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 1.530.047.179,-**
2. Sasaran Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indicator Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan dengan **capaian kinerja 235,07 %** sedangkan realisasi anggaran 93,88 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 6,12 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 738.863.201,-**
3. Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indicator Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian dengan **capaian kinerja 138,10 %** sedangkan realisasi anggaran 85,87 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 14,29 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 138.250.459,-**
4. Sasaran Meningkatnya kemandirian Fiskal dengan indicator Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD dengan **capaian kinerja 103,85 %** sedangkan realisasi anggaran 86,71 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 13,29 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 1.011.317.005,-**
5. Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indicator Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan dengan **capaian kinerja 100,00 %** sedangkan realisasi anggaran 94,99 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 5,01 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 13.517.518.668,-**

6. Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indicator Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi dengan **capaian kinerja 100,00 %** sedangkan realisasi anggaran 93,12 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 6,88 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 233.597.432,-**
 7. Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indicator Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps dengan **capaian kinerja 140,00 %** sedangkan realisasi anggaran 99,11 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 0,89 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 68.370.519,-**
 8. Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indicator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan **capaian kinerja 100,37 %** sedangkan realisasi anggaran 62,53 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 37,47 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 94.777.081.481,-**
 9. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indicator Angka Kematian Ibu dengan **capaian kinerja 123,81 %** sedangkan realisasi anggaran 90,72 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 9,28 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 2.366.127.559,-**
 10. Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indicator Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan dengan **capaian kinerja 100 %** sedangkan realisasi anggaran 66,62 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 9,28 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 1.177.578.457,-**
 11. Sasaran Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dengan indicator Indeks kualitas lingkungan hidup dengan **capaian kinerja 110,02 %** sedangkan realisasi anggaran 91,68 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 8,32 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 636.665.784,-**
- f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Pembagian alokasi anggaran disesuaikan dengan sasaran kinerja Pemerintah Daerah tersebut. Secara keseluruhan Total Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 943.413.460.009,- , sedangkan realisasi Anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 804.570.745.952,- atau mencapai 85,28 %.

Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Tabel 2.3.6
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sector pertanian peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sector pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	1 Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura	886.233.900	868.366.451	97,98
			2 Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	10.876.501.250	10.127.156.356	93,11
			3 Program Pengembangan Perkebunan	5.563.639.639	5.485.639.900	98,60
			4 Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.799.142.000	2.743.730.927	98,02
			5 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	490.510.000	441.556.175	90,02
			6 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	643.000.000	638.917.326	99,37
			7 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	2.895.086.506	2.331.550.506	80,53
			8 Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	366.761.854	354.360.329	96,62
			9 Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	117.791.900	117.341.900	99,62
TOTAL				24.638.667.049	23.108.619.870	93,79
2	Meningkatnya produksi sub sector perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sector perikanan	1 Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	716.546.600	692.391.700	96,63
			2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4.453.012.588	4.059.214.979	91,16
			3 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil	1.497.498.368	1.437.610.994	96,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran		Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
				Perikanan			
			4	Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	635.278.995	629.802.750	99,14
			5	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	611.390.800	553.688.021	90,56
			6	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	1.842.273.700	1.739.496.908	94,42
			7	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	2.313.012.500	2.217.944.998	95,89
TOTAL					12.069.013.551	11.330.150.350	93,88
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (tamu asing dan Indonesia)	1	Program Pelestarian Budaya	236.991.039	236.989.039	100,00
TOTAL					236.991.039	236.989.039	100,00
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	16.590.900	16.590.900	100,00
			3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	114.536.955	105.211.325	91,86
			4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata	38.807.000	38.807.000	100,00
TOTAL					169.934.855	160.609.225	94,51
4	Meningkatnya produksi sector pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sector pertambangan dan penggalan	1	Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	305.216.530	262.153.737	85,89
			2	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	279.527.150	233.876.772	83,67

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran		Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			3	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	160.132.150	158.149.012	98,76
			4	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	233.725.500	186.171.350	79,65
TOTAL					978.601.330	840.350.871	85,87
5	Meningkatnya sector perindustrian	Persentase pertumbuhan sector industry pengolahan	1	Program Pengembang Wilayah dan Pengawasan Industri	99.576.274	94.057.074	94,46
			2	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	4.095.327.241	3.734.793.175	91,20
			3	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian	215.668.900	215.473.899	99,91
			4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	2.610.790.000	2.156.462.547	82,60
TOTAL					7.021.362.415	6.200.786.695	88,31
6	Meningkatnya kemandirian fiscal	Rasio pendapatan asli Daerah terhadap APBD	1	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	7.339.554.357	6.399.180.116	87,19
			2	Program Peningkatan Tata Kelolah Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	269.594.734	198.651.970	73,69
TOTAL					7.609.149.091	6.597.832.086	86,71
7	Menurunnya pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	1	Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerjaan, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial	637.571.700	606.368.830	95,11
			2	Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	72.320.700	69.959.200	96,73

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran		Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			3	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan kesehatan kerja	25.268.615	25.268.615	100,00
			4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	1.926.055.000	1.788.696.975	92,87
			5	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	184.999.100	178.816.900	96,66
			6	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	152.835.000	152.834.800	100,00
			7	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	4.980.986.010	4.440.967.870	89,16
			8	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3.468.411.160	2.792.733.625	80,52
			9	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	1.507.146.480	1.435.851.300	95,27
			10	Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	84.212.380	84.212.380	100,00
			11	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	35.037.060	35.037.060	100,00
			12	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	175.047.030	168.341.480	96,17
			13	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	440.744.894	427.695.295	97,04
TOTAL					13.690.635.129	12.206.784.330	89,16
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk	1	Program Pemberdayaan	540.757.500	486.158.447	89,90

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran		Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
		miskin		Sosial			
			2	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	1.019.440.800	968.751.405	95,03
			3	Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	1.443.055.500	1.257.556.150	87,15
			4	Program Rehabilitasi Sosial	584.538.500	567.290.400	97,05
			5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.051.299.000	931.388.900	88,59
			6	Program Penanganan Fakir Miskin	774.412.150	705.476.550	91,10
			7	Program Pengembangan Perdagangan	670.057.998	473.550.148	70,67
TOTAL					6.083.561.448	5.390.172.000	88,60
9	Menurunnya inflasi	Angka inflasi	1	Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan	566.448.000	552.422.425	97,52
TOTAL					566.448.000	552.422.425	97,52
10	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil	338.900.800	335.979.950	99,14
			2	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	227.163.100	203.580.931	89,62
TOTAL					566.063.900	539.560.881	95,32
11	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan		Program Kebinamargaan	264.909.216.193	251.645.005.131	94,99
				Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	4.729.090.321	4.475.782.715	94,64
TOTAL					269.638.306.514	256.120.787.846	94,99
		Persentase kabupatn/kota yang telah terkoneksi		Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	2.410.029.500	2.377.759.148	98,66
				Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan	986.345.571	785.018.491	79,59

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TOTAL				3.396.375.071	3.162.777.639	93,12
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	7.719.104.078	7.650.733.559	99,11
TOTAL				7.719.104.078	7.650.733.559	99,11
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan lama sekolah (angka harapan lama sekolah laki-laki, angka harapan lama sekolah perempuan)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	27.949.566.700	26.981.245.840	96,54
TOTAL				27.949.566.700	26.981.245.840	96,54
		Rata-rata lama sekolah (RLS)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	44.176.791.100	39.892.697.723	90,30
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	5.929.258.000	5.467.202.663	92,21
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	7.429.220.000	3.844.425.278	51,75
			Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	91.204.122.829	13.757.764.495	15,08
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	32.709.689.266	29.383.554.751	89,83
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	14.233.719.524	13.253.725.406	93,11
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	33.009.283.978	30.385.040.533	92,05
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah	24.231.371.504	22.161.963.871	91,46

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Belitung dan Belitung Timur			
TOTAL				252.923.456.201	158.146.374.720	62,53
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Program Kesehatan Masyarakat	4.829.206.995	2.979.058.411	61,69
TOTAL				4.829.206.995	2.979.058.411	
		Angka kematian Ibu	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	25.509.569.195	23.143.441.636	90,72
TOTAL				25.509.569.195	23.143.441.636	
		Angka kematian Bayi	Program Pelayanan Kesehatan	29.147.452.750	24.982.795.426	85,71
TOTAL				29.147.452.750	24.982.795.426	85,71
		Angka Stunting	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	2.102.491.250	1.925.885.127	91,60
			Program Pelayanan Teknis Laboratuim Kesehatan	5.050.043.252	4.185.046.717	82,87
			Program Pelayanan Teknis Keperawatan	809.093.695	624.497.677	77,18
			Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	11.169.690.073	10.232.973.052	91,61
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	72.229.330.772	73.298.490.306	101,48
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	22.500.000.000	22.240.470.473	98,85
			Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	7.762.287.716	6.957.078.055	89,63
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	2.517.147.058	2.474.631.638	98,31
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ	13.543.000.000	10.432.529.292	77,03
TOTAL				137.683.083.816	132.371.602.337	96,14

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	1.955.433.199	1.339.804.697	68,52
			Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan	423.730.170	360.746.000	85,14
			Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	1.035.942.500	630.971.715	60,91
			Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan	112.220.000	18.225.000	16,24
TOTAL				3.527.325.869	2.349.747.412	66,62
		Indeks RB	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	1.442.939.629	1.399.061.557	96,96
			Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	24.800.600	24.800.600	100,00
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	18.856.000	18.856.000	100,00
			Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	60.356.800	60.356.800	100,00
			Program Penelitian dan Pengembangan	71.915.385	71.915.385	100,00
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	242.760.000	223.874.305	92,22
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	3.317.610.794	3.203.004.700	96,55
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	20.750.000	18.255.000	87,98
			Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk	60.655.511.680	56.453.342.470	93,07

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Hukum Perundang-Undangan			
			Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggan, Kehumasan dan Protokoler Dewan	6.675.954.154	6.317.110.877	94,62
TOTAL				72.531.455.042	67.790.577.694	93,46
15	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	65.326.780	63.012.880	96,46
TOTAL				65.326.780	63.012.880	96,46
16	Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	899.937.412	854.312.860	94,93
TOTAL				899.937.412	854.312.860	94,93
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	Program Pembinaan Politik dalam Negeri	368.475.000	345.205.788	93,68
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	102.088.261	102.088.261	100,00
			Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	167.047.520	107.437.448	64,32
			Program Penegakan Perda dan Perkada	277.127.440	218.272.600	78,76
			Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.378.616.200	2.136.090.136	89,80
TOTAL				3.293.354.421	2.909.094.233	88,33
18	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.354.469.800	1.267.465.480	93,58
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	15.062.568.800	14.009.271.084	93,01
			Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan	6.599.412.760	5.469.230.846	82,87

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bencana			
TOTAL				23.016.451.360	20.745.967.410	90,14
19	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	138.961.663	138.544.063	99,70
			Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup	160.330.650	157.550.000	98,27
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas	148.547.818	148.547.818	100,00
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	1.734.279.050	1.702.430.473	98,16
			Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	195.433.997	183.745.697	94,02
			Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	1.862.509.900	1.854.752.689	99,58
			Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	1.087.430.900	846.878.851	77,88
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	2.325.566.020	2.122.488.686	91,27
TOTAL				7.653.059.998	7.016.394.214	91,68

Tingkat efektifitas penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja anggaran. Setelah dilakukan penghitungan, maka akan diketahui efektif atau tidaknya alokasi anggaran terhadap tercapainya target sasaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya capaian tersebut dievaluasi guna mengetahui tingkat keberhasilan dan mendapatkan strategi yang tepat untuk menghindari kegagalan dalam pencapaian target kinerja. Dalam memberikan penilaian tingkat efektifitas dapat menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.3.7
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja 2019

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat efektif
2	90 % sampai 100%	Efektif
3	75 % s.d < 90 %	Cukup efektif
4	Kurang dari 50%	Tidak efektif

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 27 indikator sasaran kinerja terdapat 9 indikator kinerja yang capaiannya sangat efektif, 12 indikator kinerja yang capaiannya efektif, 3 indikator kinerja yang capaiannya cukup efektif dan 2 indikator kinerja yang capaiannya tidak efektif. Efektifitas penggunaan anggaran dapat dirinci sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah untuk Indikator Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan jumlah anggaran sebesar Rp. 269.638.306.514,- dapat direalisasikan mencapai 94,99 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 100 % sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
2. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat untuk Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) jumlah anggaran sebesar Rp. 252.923.456.201,- dapat direalisasikan mencapai 62,53 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 100,37 % sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
3. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk Indikator Angka Stunting jumlah anggaran sebesar Rp. 137.683.083.816,- dapat direalisasikan mencapai 96,14 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 40,42 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dikategorikan **tidak efektif** .
4. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk Indikator Indeks RB jumlah anggaran sebesar Rp. 72.531.455.042,- dapat direalisasikan mencapai 93,46 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 99,15 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
5. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk Indikator Angka Kematian Bayi jumlah anggaran sebesar Rp. 29.147.452.750,- dapat direalisasikan mencapai 85,71% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 99,86

%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.

6. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat untuk Indikator Angka harapan lama sekolah jumlah anggaran sebesar Rp. 27.949.566.700,- dapat direalisasikan mencapai 96,54 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 99,75 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
7. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk Indikator Angka kematian ibu jumlah anggaran sebesar Rp. 25.509.569.195,- dapat direalisasikan mencapai 90,72 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 123,81%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
8. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian untuk Indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.638.667.049,- dapat direalisasikan mencapai 93,79% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 133,97%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
9. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana untuk Indikator Indeks kapasitas bencana daerah jumlah anggaran sebesar Rp. 23.016.451.360,- dapat direalisasikan mencapai 90,14 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 96,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
10. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya Pengangguran untuk indikator Persentase Angka Pengangguran jumlah anggaran sebesar Rp. 13.690.635.129,- dapat direalisasikan mencapai 89,16 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 96,86%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
11. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan untuk indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.069.013.551,- dapat direalisasikan mencapai 93,88 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 235,07 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
12. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk untuk indikator Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps jumlah anggaran sebesar

Rp. 7.719.104.078,- dapat direalisasikan mencapai 99,11% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 140,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.

13. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup untuk indikator Indeks kualitas lingkungan hidup jumlah anggaran sebesar Rp. 7.653.059.998,- dapat direalisasikan mencapai 91,68% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 110,02%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
14. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kemandirian Fiskal untuk indikator Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD jumlah anggaran sebesar Rp. 7.609.149.091,- dapat direalisasikan mencapai 86,71% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 103,85%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
15. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi sektor perindustrian untuk indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.021.362.415,- dapat direalisasikan mencapai 88,31% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 93,60%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
16. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya kemiskinan untuk indikator Persentase Angka Kemiskinan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.083.561.448,- dapat direalisasikan mencapai 88,60% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 78,51%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
17. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk indikator Angka harapan hidup jumlah anggaran sebesar Rp. 4.829.206.995,- dapat direalisasikan mencapai 61,69% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 99,92%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
18. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk untuk indikator Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi jumlah anggaran sebesar Rp. 3.396.375.071,- dapat direalisasikan mencapai 93,12% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 100,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
19. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk indikator Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.527.325.869,- dapat direalisasikan mencapai 66,62% dengan hasil capaian

kinerjanya sebesar 100,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.

20. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi untuk indikator Skor aspek lembaga demokrasi jumlah anggaran sebesar Rp. 3.293.354.421,- dapat direalisasikan mencapai 88,33% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 89,24%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
21. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan untuk indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian jumlah anggaran sebesar Rp. 978.601.330,- dapat direalisasikan mencapai 85,87% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 138,10%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
22. Alokasi anggaran pencapaian sasaran terpenuhinya hak-hak politik masyarakat untuk indikator Skor aspek hak-hak politik jumlah anggaran sebesar Rp. 899.937.412,- dapat direalisasikan mencapai 94,93% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 92,29%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
23. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya Inflasi untuk indikator Persentase Tingkat Inflasi jumlah anggaran sebesar Rp. 566.448.000,- dapat direalisasikan mencapai 97,52% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 27,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **tidak efektif**.
24. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk untuk indikator Persentase laju pertumbuhan Penduduk jumlah anggaran sebesar Rp. 566.063.900,- dapat direalisasikan mencapai 95,32% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 81,73%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
25. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik jumlah anggaran sebesar Rp. 236.991.039,- dapat direalisasikan mencapai 100,00% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 89,15%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
26. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan Persentase peningkatan jumlah wisatawan jumlah anggaran sebesar Rp. 169.934.855,- dapat direalisasikan mencapai 94,51% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 50,00%,

sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **tidak efektif**.

27. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya Aspek kebebasan sipil dengan indikator Skor aspek kebebasan sipil jumlah anggaran sebesar Rp. 65.326.780,- dapat direalisasikan mencapai 96,46% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 95,85%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.

Adapun Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, dan Jasa Perkebunan.

Target sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 7,78 sehingga persentase capaian sebesar 246,98 atau tingkat capaian dikategorikan **sangat berhasil**.

Sektor pertanian menguat didorong oleh membaiknya kinerja perkebunan karet dan lada akibat kenaikan harga karet dan lada global. Harga rata-rata karet global mencapai USD1,92/kg. Tahun 2020 sektor pertanian dan perkebunan mulai naik sebesar 2,59 persen. Bisa dilihat dari harga komoditi sawit yang mulai naik pada kisaran Rp 1.500 hingga mendekati Rp 1.800. Begitupun harga lada saat ini mulai beranjak naik dan Pemerintah Provinsi juga mengembangkan komoditi lain seperti tanaman porang dan jahe merah.

Komoditas Pertanian dan kehutanan secara bertahap telah menggerus peran timah yang telah menjadi andalan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sejak 350 tahun silam. dengan kian besarnya peran komoditas lain, selain timah, mengindikasikan masyarakat Babel sudah kreatif dalam menggali potensi daerah.

Pemerintah berusaha mendukung melalui kebijakan yang kondusif, dan membangun jaringan pasar yang lebih kompetitif. Potensi Bangka Belitung sangat variatif dan rata-rata memiliki keunggulan.

Saat ini Babel telah mampu mengalokasikan 37 persen kebutuhan beras daerah dari produksi sendiri. Selain meningkatkan tanaman pangan, upaya lain, membenahi tata niaga dan sistem budidaya komoditas tradisional masyarakat Babel, lada dan karet yang dalam beberapa tahun terakhir harganya turun drastis hingga menjadi pukulan berat bagi petani. Selain itu komoditas lain yang bakal menjadi andalan, kelapa sawit yang kini sudah banyak dikembangkan masyarakat dan sejumlah perusahaan.

Terhadap kelapa sawit ini Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tengah merancang kebijakan untuk bisa ekspor langsung dari Babel, dan secara bertahap minta agar pengusaha bergerak ke hilir tidak sebatas hanya Crude Palm Oil atau CPO, minyak sawit kasar.

2. Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Perikanan

Target sebesar 3,45 dengan realisasi sebesar 9,76, sehingga persentase capaian sebesar 282,89 atau tingkat capaian dikategorikan **sangat berhasil**. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

kinerja sektor perikanan juga membbaik sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan budidaya udang vannamei di Bangka Belitung dan kinerja perikanan tangkap juga masih baik sejalan dengan kondisi cuaca yang mendukung.

BPS telah menempatkan Babel pada peringkat kedua sebagai provinsi terbaik dalam pertumbuhan ekonominya selama tahun 2020, setelah Provinsi Jambi. Dan pertumbuhan ekonomi Babel pada 2020, mencapai – 1,04 persen, sedangkan Jambi – 0,99 persen. Tentu ini memberikan harapan yang lebih cerah ke depan, di tengah kegalauan masyarakat pasca timah.

Sebagai provinsi kepulauan, Babel memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat potensi, terutama untuk perikanan budidaya yang belum tergarap optimal. Saat ini sektor perikanan ini, terutama udang yang memiliki pasar ekspor yang sangat luas, sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah mengupayakan bisa ekspor langsung dari Babel dan langkah yang tengah dipersiapkan memperluas Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang dan membangun colfstorage berkapasitas besar.

Data dari BPS juga menyebutkan walaupun terkontraksi, namun tetap saja, Babel mengalami pertumbuhan ekonomi. Adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda memberikan dampak besar bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tercermin dari banyaknya lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 dan sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha pertanian dan kehutanan.

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik

Target sebesar 217.345 dengan realisasi sebesar 223,951 sehingga persentase capaian sebesar 103,04 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

Pengembangan Komponen Pariwisata meliputi Pengembangan 3A; Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas destinasi pariwisata prioritas di Kepulauan Bangka Belitung dan menghasilkan 5 poin rekomendasi untuk menciptakan ekosistem pariwisata Kepulauan Bangka Belitung yang berkelanjutan.

Dengan berubahnya Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang semula Tanjung Kelayang dan sekitarnya menjadi DPP Bangka Belitung maka, harus diperkuat dengan :

- a. Peningkatan kualitas konektivitas yang menghubungkan Bangka dan Belitung.
- b. Perlunya kreativitas dalam memperkenalkan potensi Daya Tarik Wisata (DTW) di Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Perlunya ketegasan dari pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Perlunya meningkatkan kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap program-program Kepulauan Bangka Belitung sebagai DPP.
- e. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif mulai dari persiapan sampai pelaksanaan program program prioritas bagi seluruh stakeholder.

Pariwisata harus bangkit, sebagai salah satu sektor pemasukan daerah yang dapat diandalkan tentu harus ada andil yang jelas dari masyarakat untuk memajukan pariwisata di Bangka Belitung yang sempat stagnan dikarenakan Pandemi Covid-19.

Untuk menciptakan ekosistem pariwisata Kepulauan Bangka Belitung yang berkelanjutan perlu adanya kreativitas dalam memperkenalkan potensi Daya Tarik Wisata (DTW) di Kepulauan Bangka Belitung yang sebenarnya sudah menjadi hal yang lazim di lakukan di era kekinian di seluruh dunia dimana teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi faktor pendorong untuk memajukan dunia kepariwisataan yang berkelanjutan di Kepulauan Bangka Belitung.

Kita berharap dengan majunya dunia kepariwisataan di Bangka Belitung akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang dan akan berdampak pada tingkat Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor Pariwisata sehingga bisa membuat masyarakat sejahtera, serta bisa menjadi salah satu sektor bisnis yang menjanjikan di masa yang akan datang dimana Bangka Belitung tidak sepenuhnya lagi bergantung pada sektor pertambangan timah.

4. Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan

Target sebesar 0,04 dengan realisasi sebesar 0,02, sehingga persentase capaian sebesar 50,00 atau tingkat capaian dikategorikan kurang berhasil. Tingkat capaian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

Adapun yang menjadi hambatan yang menjadi penyebab target tidak tercapai yakni adanya Wabah COVID-19 yang telah memukul industri pariwisata dalam negeri. Adanya pembatasan sosial dan larangan kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan domestik telah menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik dan wisatawan

mancanegara untuk berkunjung ke tempat tujuan wisata di Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga berdampak pula pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada sector pariwisata.

5. Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian Target sebesar 0,63 dengan realisasi sebesar -9,23, sehingga persentase capaian sebesar -1.500 atau tingkat capaian dikategorikan kurang berhasil.

Perbaikan ekonomi [Bangka Belitung](#) pada tahun 2020 didorong oleh membaiknya kinerja ekspor luar negeri yang tercatat tumbuh positif sebesar 4,28% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi dalam sebesar 42,33% (yoy). Hal ini ditopang oleh membaiknya ekspor timah yang tumbuh hingga 7,14% (yoy) seiring dengan membaiknya harga timah global. Rata-rata harga timah global pada triwulan ini menyentuh USD17.678/ton, meningkat 3,15% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan tajam hingga 24,96% (yoy).

Membaiknya sektor pertambangan didorong oleh adanya perbaikan harga timah global sehingga meningkatkan keyakinan pelaku usaha pertambangan.

6. Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan Target sebesar 1,25 dengan realisasi sebesar -5,64, sehingga persentase capaian sebesar -451 atau tingkat capaian dikategorikan kurang berhasil.

kinerja industri pengolahan menurun karena menurunnya produksi industri logam dasar (timah) dan industri makanan dan minuman (industri Crude Palm Oil/CPO) sehingga menahan laju pertumbuhan lebih lanjut.

Kinerja industri pengolahan dan perdagangan diperkirakan akan semakin [membaik](#) sejalan dengan adanya tren perbaikan harga CPO dan timah global sehingga dapat mendorong kinerja perdagangan ekspor luar negeri.

7. Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD

Target sebesar 0,26 dengan realisasi sebesar 0,27, sehingga persentase capaian sebesar 103,8 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 terealisasi tercatat sebesar Rp 686.034.305.236,63 (enam ratus delapan puluh enam miliar tiga puluh empat juta tiga ratus lima ribu dua ratus tiga puluh enam koma enam puluh tiga rupiah) dari target PAD sebesar Rp 748.055.044.035,47 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima puluh lima juta empat puluh empat ribu tiga puluh lima koma empat

puluh tujuh rupiah). Sedangkan target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 2.555.339.034.450,47 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh koma empat puluh tujuh rupiah) terealisasi sebesar 94,13 % atau terealisasi sebesar Rp 2.405.214.874.172,63 (dua triliun empat ratus lima miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu koma enam puluh tiga rupiah).

8. Persentase Angka Pengangguran

Target sebesar 5,42 dengan realisasi sebesar 5,25, sehingga persentase capaian sebesar 103,23 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Selain pengangguran, perlu diperhatikan seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi Komponen dari dampak Covid-19 terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja (working hour losses):

- a. Pengangguran
- b. Bukan Angkatan Kerja (BAK)
- c. Sementara tidak bekerja

Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (shorter hours) Dari total penduduk usia kerja sebanyak 1. 104. 219 orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar 9,05 persen.

Pengangguran karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk pengangguran dan memiliki pengalaman berhenti bekerja karena Covid-19 pada periode Februari-Agustus 2020.

Agustus 2020 Kota Pangkalpinang mengalami dampak Covid tertinggi terhadap penduduk usia kerja di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 26,91 persen, dan terendah adalah Kabupaten Belitung Timur sebesar 7,64 persen.

9. Persentase Angka Kemiskinan

Target sebesar 5,77 dengan realisasi sebesar 4,89 sehingga persentase capaian sebesar 118 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah guna menekan angka kemiskinan. selama tahun 2010-2018, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kisaran 5-7 persen. Di tahun 2019 dan 2020, persentase penduduk miskin berhasil diturunkan dari 5,25 persen di tahun 2018 menjadi 4,62 persen di tahun 2019 dan turun lagi sehingga menjadi 4,50 persen di tahun 2020. Tahun 2010, jumlah penduduk miskin sebesar 67,75 ribu jiwa atau 6,51 persen dari total penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 68,38 ribu jiwa atau 4,62 persen dari jumlah

penduduk. Sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sedikit meningkat menjadi 68,39 ribu jiwa, namun secara persentase mengalami penurunan, yaitu menjadi 4,53 persen dari jumlah penduduk.

Pada tahun 2020 meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, idealnya akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memperkecil peluang berada pada kondisi miskin.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi maka besar kemungkinan dapat keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Disamping itu, pendapatan penduduk yang bekerja di sektor formal lebih tinggi dari pendapatan penduduk yang bekerja di sektor informal, oleh sebab itu semakin banyak penduduk yang bekerja di sektor formal maka peluang untuk keluar dari kemiskinan semakin besar.

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020 – September 2020 antara lain adalah:

- a. Pandemi Covid 19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan.
- b. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rata-rata pengeluaran penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Penurunan pengeluaran pada daerah perkotaan menjadi Rp 708.552,- pada September 2020 dan untuk daerah perdesaan menjadi Rp 677.278,- pada September 2020.
- c. Penduduk usia kerja yang terdampak covid 19 sebanyak 99.991 orang atau 9,05 persen.

10. Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target sebesar 4 dengan realisasi sebesar 1,08, sehingga persentase capaian sebesar 370,37 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Selama tahun 2020 (Januari-Desember) inflasi adalah sebesar 1,08 persen, lebih kecil dari tahun 2019 (Januari-Desember) yang mengalami inflasi sebesar 2,62 persen. Dilihat dari besarnya andil inflasi selama tahun 2020, dari 11 kelompok pengeluaran, 9 kelompok pengeluaran memberikan andil inflasi dan 2 kelompok pengeluaran memberikan andil deflasi.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,4092 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,0274persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0169 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,1269 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0093 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,0072 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,1270 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,1739 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,2334 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,9390 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,1079 persen. Komoditas sebagai andil utama inflasi tahun 2020 di antaranya ikan kembung, ikan kerisi, rokok kretek filter, dan minyak goreng. Sedangkan komoditas pemberi andil terbesar pada deflasi diantaranya angkutan udara, sawi hijau, biaya pulsa ponsel, dan udang basah.

11. Persentase laju pertumbuhan Penduduk

Target sebesar 2,08 dengan realisasi sebesar 1,70 sehingga persentase capaian sebesar 122,35 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

Berdasarkan SP 2020, Jumlah Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung pada September 2020 adalah 1.455.678 Jiwa. Dalam 10 tahun terakhir meningkat sebanyak 232.382 Jiwa. Dengan luas daratan sebesar 16.424,14 km², maka kepadatan penduduk provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 88,63 jiwa per km² Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 1,70 persen.

Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Kep. Bangka Belitung hasil SP 2020 sebanyak 749.548 orang atau 51,49% dari total jumlah penduduk di Bangka Belitung.

Jumlah penduduk perempuan di Indonesia hasil SP 2020 sebanyak 706.130 orang atau 48,51 % dari total jumlah penduduk di Bangka Belitung.

12. Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan

Target sebesar 0,10 dengan realisasi sebesar 0,10 sehingga persentase capaian sebesar 100 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jalan yang terbentang 600,42 km dengan status sebagai jalan negara dan 850,99 km dengan status jalan provinsi. Berdasarkan kondisi jalan, pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar sudah memiliki jalan yang berkondisi baik. Hal ini terbukti dengan sudah banyak jalan aspal dari perkotaan hingga pelosok pedesaan di Kepulauan Bangka Belitung.

Namun demikian, masih ada jalan yang memiliki kondisi rusak berat, yaitu sebesar 1,50 persen (21,75 km), dimana kondisi jalan yang mengalami kerusakan ada pada jalan dengan status jalan provinsi (21,51 km) yaitu jalan umum yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Selain itu, jalan negara yang menghubungkan jalan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional sepanjang 0,24 km juga mengalami kondisi rusak berat. Jika dilihat dari persentase, kondisi jalan pada tahun 2019 dengan kondisi jalan baik sebesar 78,37 persen (1.137,42 km), jalan sedang sebesar 16,46 persen (238,94 km), dan kondisi jalan rusak ringan 3,67 persen (53,30 km).

Kondisi jalan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu penunjang terhadap jumlah kendaraan roda empat dan roda dua. Kendaraan roda dua dan roda empat berfungsi sebagai mobilitas penumpang maupun barang dalam suatu daerah.

13. Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi

Target sebesar 11,43 dengan realisasi sebesar 11,43 sehingga persentase capaian sebesar 100 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.

Proses mobilisasi yang lancar dapat menjadi salah satu sarana penunjang perekonomian suatu wilayah. Kendaraan roda dua menjadi kendaraan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2019 tercatat sebesar 338.118 buah, angka ini mengalami peningkatan 2,32 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 330.452 buah. Sedangkan Bus/Mini Bus menjadi moda transportasi kendaraan roda empat pilihan terakhir dari enam jenis kendaraan yang digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 757, meningkat sebesar 8,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendaraan roda dua menjadi kendaraan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2019 tercatat sebesar 338.118 buah, angka ini mengalami peningkatan 2,32 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 330.452 buah. Sedangkan Bus/Mini Bus menjadi moda transportasi kendaraan roda empat pilihan terakhir dari enam jenis kendaraan yang digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 757, meningkat sebesar 8,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbentuk kepulauan memerlukan sarana dalam pendistribusian barang antar kabupaten. Kendaraan roda empat seperti Pick up dan Truk mempunyai andil besar dalam mobilitas barang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan masing-masing sebesar 18.799 buah dan 9.453 buah pada tahun 2019. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi yang berbentuk kepulauan sehingga aktifitas perhubungan penduduk secara ekonomi maupun nonekonomi mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi pada lalu lintas perhubungan laut. Keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut sangat menentukan kelancaran aktivitas transportasi ini. Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pelabuhan di setiap kabupaten dan kota. Pelabuhan yang terbesar dan tersibuk adalah di Pangkalbalam yang terletak di Kota Pangkalpinang sedangkan pelabuhan yang terkecil adalah pelabuhan Sungai Selan di Kabupaten Bangka Tengah.

14. Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps
Target sebesar 0,60 dengan realisasi sebesar 0,60 sehingga persentase capaian sebesar 100 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.
Hasil Susenas mencatat, pada tahun 2019 sebanyak 45,85 persen penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari. Persentase ini sebenarnya masih cukup kecil di tengah era globalisasi yang sudah merajalela.
Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk yang mengakses internet di daerah perkotaan jauh lebih besar dibandingkan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat pengetahuan penduduk dan juga ketersediaan sarana yang ada. Seperti kita ketahui, tingkat pendidikan masyarakat di desa rata-rata lebih rendah dibanding dengan pendidikan masyarakat di kota. Selain itu terbatasnya jumlah jaringan komunikasi yang ada di perdesaan juga menjadi salah satu penyebab penduduk di daerah perdesaan masih kesulitan untuk mengakses internet.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka tidaklah mengherankan apabila dilihat menurut kabupaten/kota, penduduk yang paling banyak mengakses internet pada tahun 2019 adalah penduduk Kota Pangkalpinang sebesar 62,09 persen sedangkan yang paling sedikit mengakses internet adalah Kabupaten Bangka Selatan yang hanya sebesar 40,91 persen.
Secara umum, dalam kurun waktu 2017-2019 masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin mudah dalam mengakses internet dari tahun ke tahun. Ini ditunjukkan dengan peningkatan yang terjadi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, salah satunya semakin mudahnya masyarakat dalam memperoleh akses

internet sehingga masyarakat dapat mengakses beragam informasi yang akan menambah wawasan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

15. Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)
Target sebesar 12,08 dengan realisasi sebesar 12,05 sehingga persentase capaian sebesar 99,75 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.

Secara rata-rata, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 1,41 persen per tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah di Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 1,32 persen per tahun. Pendidikan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kepulauan Bangka Belitung yang lebih baik. Meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Usaha yang lebih keras dan berkesinambungan mutlak diperlukan, mengingat rata-rata lama sekolah di Kepulauan Bangka Belitung masih di bawah angka nasional.

16. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Target sebesar 8,03 dengan realisasi sebesar 8,06 sehingga persentase capaian sebesar 100,37 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Melihat kondisi rata-rata lama sekolah selama periode 2015-2019, ternyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat jauh untuk mencapai pendidikan dasar 12 tahun. Rendahnya rata-rata lama sekolah dibandingkan program wajib belajar dua belas tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya disebabkan penduduk yang putus sekolah terutama di tingkat sekolah dasar dan banyak dari penduduk yang hanya mampu menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar terutama mereka yang berada di daerah perdesaan. Ini kemungkinan terjadi karena seorang anak lebih tertarik untuk bekerja agar mendapatkan uang.

Selain itu masyarakat masih belum merasa penting untuk menyukseskan program wajib belajar dua belas tahun. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah tertinggi adalah di Kota Pangkalpinang yaitu mencapai 9,80 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Pangkalpinang sudah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMA. Sementara itu, rata-rata lama sekolah terendah ada di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu 6,42 tahun atau hanya sampai tamat SD.

Jika dilihat menurut wilayah, pada daerah perdesaan masih sangat banyak penduduk yang hanya memiliki ijazah SD/ sederajat atau bahkan

tidak memiliki ijazah sama sekali. Pada tahun 2019, sebesar 28,37 persen penduduk perdesaan tidak memiliki ijazah dan 31,24 persen penduduk perdesaan hanya memiliki ijazah SD/ sederajat. Di daerah perkotaan, persentase penduduk yang hanya memiliki ijazah SD/ sederajat relatif lebih rendah dibandingkan wilayah perdesaan yakni sebesar 22,27 persen, sedangkan sebesar 13,74 persen penduduk perkotaan tidak memiliki ijazah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di daerah perkotaan lebih baik dibanding penduduk perdesaan.

Pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi oleh pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

17. Angka harapan hidup

Target sebesar 70,7 dengan realisasi sebesar 72,59 sehingga persentase capaian sebesar 102,6 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

18. Angka kematian ibu

Target sebesar 21 dengan realisasi sebesar 26 sehingga persentase capaian sebesar 80,76 atau tingkat capaian dikategorikan cukup berhasil. Kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 36 kasus tahun 2019 menjadi 26 kasus pada tahun 2020. Penyebab kematian ibu adalah 12 kasus (46,15%) karena hipertensi dalam kehamilan, 4 kasus (15,38%) karena perdarahan, karena infeksi 1 kasus (3,84%), 9 kasus (34,61%) karena penyebab lain-lain (emboli 3 kasus, syock cardiogenic, oedema paru, suspect cardio myopati, tumor otak, perdarahan gusi serta hepatitis dan ginjal).

Tempat kejadian kematian ibu terbanyak di Rumah Sakit sejumlah 20 kasus (76,92%), 1 kasus (3,84%) di puskesmas, 3 kasus (11,53%) di rumah, dan 2 kasus (7,69%) di perjalanan. Jika dilihat dari usia, kematian ibu terbanyak pada usia 20-34 tahun sejumlah 14 kasus (53,84%), usia lebih dari atau sama dengan 35 tahun sejumlah 10 kasus (38,46%) dan 2 kasus (7,69%) terjadi pada usia kurang dari 20 tahun. Kematian tertinggi terjadi pada masa nifas sejumlah 13 kasus (50%), masa hamil sejumlah 10 kasus (38,46%) dan saat bersalin sejumlah 3 kasus (11,53%).

Bila dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 Angka Kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 137,33/100.000 kelahiran hidup (KH) menurun menjadi 99,96/100.000 KH pada tahun 2020. Berdasarkan jumlah, kasus kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan menjadi 26/26.010 KH dari 36/26.213 KH tahun 2019 Kasus kematian ibu paling banyak terdapat di Kota Pangkalpinang sebanyak 6 kasus (23,07%) dari total kematian

ibu, dan kasus kematian ibu terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan masing-masing 2 kasus (7,62%) dari total kematian ibu.

Bila dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) paling tinggi di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 189,84/100.000 KH dan terendah di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 56,71/100.000 KH.

Terjadinya kematian ibu ini diduga berhubungan dengan belum optimalnya kualitas ANC terpadu, deteksi faktor risiko ibu hamil dan kunjungan rumah ibu hamil risiko tinggi yang belum maksimal serta penanganan kegawatdaruratan maternal yang belum maksimal di unit pelayanan. Deteksi sedini mungkin faktor risiko maupun komplikasi selama kehamilan secara integrasi dengan program terkait antara program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), gizi, imunisasi dan P2M (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) dan PTM (Penyakit Tidak Menular).

Belum optimalnya keterfungsian Puskesmas Poned dan RS Ponek di kabupaten/kota dengan total puskesmas mampu Poned 20 puskesmas (31,2%) dari 64 puskesmas. Untuk itu perlu dioptimalkan keterfungsian puskesmas Poned dan RS Ponek yang didukung dengan tenaga yang sudah dilatih serta ketersediaan alat dan sarana yang memadai. Audit Maternal Perinatal telah dilaksanakan di 7 kabupaten/kota tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya baik dari sisi kuantitas/ frekuensi maupun kualitas proses pelaksanaan termasuk keterfungsian tim pengkaji dan rekomendasi hasil belum ditindaklanjuti. Tim AMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru dibentuk tanggal 23 Desember 2020.

Upaya untuk mengurangi tingkat kematian ibu :

- ✓ Advokasi ke stakeholder terkait;
- ✓ Koordinasi lintas program dan lintas sector;
- ✓ Organisasi Profesi khususnya profesi kesehatan;
- ✓ Perguruan Tinggi;
- ✓ LSM dan mitra terkait lainnya;
- ✓ meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan;
- ✓ mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes baik fasyankes pemerintah maupun swasta;
- ✓ Audit Maternal Perinatal Terintegrasi dalam Surveilans Kematian Ibu dan optimalisasi penggunaan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN),
- ✓ mengoptimalkan peran dokter dalam ANC, pendampingan RS prioritas bagi kabupaten lokus.
- ✓ Optimalisasi dukungan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam implementasi upaya peningkatan kesehatan keluarga antara lain melalui dukungan kebijakan penganggaran, perencanaan program dan kegiatan lintas sektor serta penguatan

sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) juga diperlukan.

19. Angka Kematian Bayi

Target sebesar 7,16 dengan realisasi sebesar 7,15, sehingga persentase capaian sebesar 100,1 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Kematian bayi (0–12 bulan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 186 kasus (7,15/1000 KH) menurun dari tahun 2019 sejumlah 188 kasus (7,17/1000 KH). Jumlah kematian bayi pada tahun 2020 terbanyak terdapat di Kabupaten Belitung 46 kasus (14,39/1000 KH) atau 24,73% dari total kematian bayi) dan paling sedikit terdapat di Kota Pangkalpinang 9 kasus (2,12/1000 KH atau 4,83% dari total kematian bayi). Tertinggi terjadi pada usia neonatal (0-28 hari) sebanyak 135 kasus (5,19/1000 KH atau 72,58%).

Penyebab medis kematian bayi antara lain karena BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), asfiksia, sepsis, kelainan kongenital dan lain-lain. Penyebab kematian bayi paling banyak disebabkan karena BBLR (54 kasus atau 40% dari total kematian neonatus). Kematian neonates karena BBLR paling banyak terdapat di Kabupaten Belitung (35,18% dari total kematian neonatus karena BBLR). Kemudian kematian neonatus yang disebabkan karena asfiksia (41 kasus atau 30,37% dari total kematian neonatus), kelainan kongenital (18 kasus atau 13,3% dari total kematian neonatus), sepsis (2 kasus atau 1,48% dari total kematian neonatus) lain-lain (20 kasus atau 14,81% dari total kematian neonatus).

Ada beberapa hal yang patut diduga menjadi penyebab kematian neonatus yaitu belum semua tenaga kesehatan di unit pelayanan polindes/poskesdes, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap/non rawat inap kompeten dalam penanganan kasus-kasus utamanya kegawatdaruratan pada bayi baru lahir.

Upaya untuk meningkatkan keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan baik di unit pelayanan dasar maupun rujukan guna meningkatkan kompetensi mereka di tempat tugas;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana di beberapa unit pelayanan dalam menangani bayi baru lahir yang mengalami komplikasi;
- c. Advokasi ke stakeholder terkait;
- d. koordinasi lintas program dan lintas sektor; meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan;
- e. mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes baik fasyankes pemerintah maupun swasta;
- f. Audit Maternal Perinatal terintegrasi dalam SKI;

- g. optimalisasi penggunaan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN),
- h. Mengoptimalkan peran dokter dalam ANC,
- i. Pendampingan RS prioritas bagi kabupaten lokus,
- j. Optimalisasi penerapan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada bayi muda usia kurang dari 2 bulan, dan usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun.
- k. Peningkatan fungsi posyandu terintegrasi; koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- l. Pembinaan kader;
- m. Meningkatkan kapasitas teknis SDM gizi,
- n. Penundaan usia kehamilan.
- o. Optimalisasi dukungan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam implementasi upaya peningkatan kesehatan keluarga antara lain melalui dukungan kebijakan penganggaran, perencanaan program dan kegiatan lintas sektor (transportasi, listrik, air bersih, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat) serta penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tata kelola yang baik (good governance).

20. Angka Stunting

Target sebesar 24 dengan realisasi sebesar 9,7 sehingga persentase capaian sebesar 247,42 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 4.364 anak balita (4,15% dari sasaran anak balita yang ditimbang berjumlah 105.227) menurun dari tahun 2019 berjumlah 5.154 balita (6% dari sasaran anak balita yang ditimbang berjumlah 85.854) di bawah target kinerja tahun 2020. Jumlah kekurangan gizi (underweight) pada anak balita tahun 2020 paling banyak terdapat di Kabupaten Bangka Barat (12.26% dari total provinsi) dan paling sedikit terdapat di Kota Pangkalpinang (1,16%).

Penyebab secara langsung kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dipengaruhi tiga hal:

- ✓ Anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang,
- ✓ Anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai, dan
- ✓ anak menderita penyakit infeksi.

Balita dengan kekurangan gizi (underweight) pada anak balita tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan. Kekurangan gizi (underweight) pada anak balita merupakan dampak dari berbagai macam penyebab, seperti sanitasi yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, ketersediaan pangan, transportasi, adat istiadat (sosial budaya), dan sebagainya. Oleh karena itu, pemecahannya pun harus

secara komprehensif. Perawatan anak balita dengan kekurangan gizi (underweight) dapat dilaksanakan di Puskesmas Perawatan atau Rumah Sakit setempat dengan Tim Asuhan Gizi yang terdiri dari dokter, nutrisisionis/dietisien dan perawat.

Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Peningkatan fungsi posyandu terintegrasi,
- b. Meningkatkan komitmen kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mengedukasi,
- c. Menggerakkan peran serta masyarakat sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak dasar hidup penduduk sesuai siklus hidup, khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),
- d. Pembinaan kader;
- e. meningkatkan kapasitas teknis SDM gizi,
- f. penundaan usia kehamilan.

Secara terperinci Intervensi Gizi Spesifik yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelayanan gizi bagi anak balita :
 - 1) Meningkatkan pelayanan bagi anak balita di Posyandu dengan melakukan pengukuran rutin status gizi anak balita (BB/TB/PB),
 - 2) Konseling gizi bagi anak balita, Merujuk anak yang tidak naik dua kali berat badannya, menangani anak dengan gizi buruk yang dirujuk dan diberikan PMT.
- b. Pelayanan gizi remaja putri
 - 1) Meningkatkan pelayanan gizi remaja putri di sekolah (usia 12- 18 tahun) melalui pemberian tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu (52 tablet/tahun)
 - 2) Konseling gizi bagi remaja dan Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS).
- c. Pelayanan gizi bagi ibu hamil
 - 1) Meningkatkan pelayanan gizi ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan antropometri ibu hamil
 - 2) Pemberian tablet Fe minimal 90 tablet
 - 3) Konseling ibu hamil
 - 4) Kelas edukasi bagi ibu hamil Penanganan ibu hamil KEK melalui pemberian PMT.

Pada Tahun 2020 Bappenas telah menetapkan sebanyak 160 kabupaten/Kota yang menjadi target prioritas penurunan angka stunting dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 3 Lokus yaitu, Kabupaten Bangka, Bangka Barat dan Bangka Selatan.

Dalam rangka untuk meningkatkan penanganan stunting di ketiga Kabupaten tersebut akan di upayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengalokasian anggaran program/kegiatan penanganan stunting

- b. Meningkatkan keterlibatan penanganan stunting dari non pemerintah melalui program dari CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD.
- c. Meningkatkan inovasi daerah dalam proses penanganan stunting
- d. Pelaksanaan Bimtek tentang money penanganan stunting
- e. Meningkatkan intensitas kampanye cegah stunting di daerah

1. Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan

Target opini WTP dengan realisasi mendapat opini WTP, sehingga persentase capaian sebesar 100 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

Opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaran yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan ketiga penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan yang cukup. BPK masih menemukan beberapa permasalahan atau kelemahan sistem pengendalian internal serta permasalahan terkait dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut masih dalam kewajaran secara material dan signifikan yang tidak mengganggu.

Hal yang akan dilakukan kedepan adalah Pemprov Kepulauan Bangka Belitung segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan LKPD TA 2019 hal ini merupakan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengakolasi anggaran daerah secara tertib, efisien, bertanggung jawab sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

2. Indeks RB

Target sebesar 67,41 dengan realisasi sebesar 66,84, sehingga persentase capaian sebesar 99,15 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan RB di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat dari adanya berbagai perubahan seperti :

- a. Memberikan pelatihan kepada Agen Perubahan.
- b. Melakukan pelatihan penyusunan proses bisnis dan evaluasi terhadap SOP.
- c. Telah menyusun kebijakan mengenai besaran TPP berdasarkan kinerja.
- d. Sudah menyusun dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan terkait WBS.

3. Skor aspek kebebasan sipil, Skor aspek hak-hak politik dan Skor aspek lembaga demokrasi
- Skor aspek kebebasan sipil
Target sebesar 87,82 dengan realisasi sebesar 84,12, sehingga persentase capaian sebesar 95,78 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil
 - Skor aspek hak-hak politik
Target sebesar 81,85 dengan realisasi sebesar 71,71, sehingga persentase capaian sebesar 87,61 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.
 - Skor aspek lembaga demokrasi
Target sebesar 80,54 dengan realisasi sebesar 75,48 sehingga persentase capaian sebesar 93,71 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.

Tingkat Demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum masih dalam kategori SEDANG. Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada 2019 sebesar 84,12; naik 3,17 poin dibanding 2018 dan masuk kategori baik. Indeks Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2019 sebesar 71,71; turun 1,85 poin dibanding 2018 dan masuk kategori sedang. Indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2019 sebesar 75,48; naik 11,72 poin dibanding 2018 dan masuk kategori sedang.

IDI 2019 dipengaruhi oleh berbagai situasi sosial politik, di antaranya: Terdapat perbaikan regulasi, kelembagaan, serta sistem pengawasan Pemilu serentak (pilpres dan pileg) 2019 sehingga lebih baik dibandingkan pemilu serentak 2014 :

- a. Bertambahnya kejadian demonstrasi yang bersifat kekerasan.
- b. Adanya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN.
- c. Bertambahnya jumlah keputusan hakim yang kontroversial.
- d. Transparansi anggaran yang semakin baik.

IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat karena adanya peningkatan pada aspek lembaga demokrasi dan kebebasan sipil. Peningkatan Aspek Lembaga Demokrasi tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah, seperti meningkatnya persentase perda inisiatif dan rekomendasi DPRD, penyediaan informasi APBD dalam rangka transparansi anggaran, serta berkurangnya keputusan hakim yang kontroversial.

Peningkatan Aspek Kebebasan Sipil didukung oleh berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah terkait kebebasan berkumpul dan berserikat serta berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Penurunan Aspek Hak-Hak Politik terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah

demonstrasi yang bersifat kekerasan, di antara terkait pengusiran KIP dan PIP oleh nelayan serta persoalan lahan perkebunan.

4. Indeks kapasitas bencana daerah
Target sebesar 0,25 dengan realisasi sebesar 0,24 sehingga persentase capaian sebesar 96,00 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.
5. Indeks kualitas lingkungan hidup
Target sebesar 59,81 dengan realisasi sebesar 65,80 sehingga persentase capaian sebesar 110,02 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.